



**PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021**

SARILAMAK, 5 AGUSTUS 2020

PENGANTAR

Sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota, disusunlah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Renja mencakup materi yang menggambarkan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2019 yang telah selesai dilaksanakan, *review* rancangan awal RKPD serta tujuan, sasaran dan prakiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019. Renja ini merupakan informasi fundamental mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung upaya pencapaian target kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021.

Semoga Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini dapat menjadi pondasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah lebih lanjut.

Payakumbuh, 5 Agustus 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M. Si

NIP. 19730913 199311 1 001



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 60 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun 2018 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140).
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2021.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2021.

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2021 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2021 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2021.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020 NOMOR 60



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 (terlampir)

BAB I	: PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan KesbangPol.....	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbang Pol	II-16
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan KesbangPol.....	II-21
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-34
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	II-41
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN	III-1
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-1
	3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
	3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.....	III-2
	3.1.3 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.....	III-3
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbang Pol	III-4
	3.2.1. Telaahan terhadap Renstra Badan Kesbang Pol Tahun 2016- 2021.....	III-5
	3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesbang Pol Tahun 2021.....	III-5
	3.3 Program dan Kegiatan.....	III-9
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V	: PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol dan Pencapaian Renstra Badan KesbangPol s/d Tahun 2019.....	II-3
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-17
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kesbangpol	II-18
Tabel 2.4	Sinergitas Pembangunan Nasional dan KesbangPol.....	II-29
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.....	II-36
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan....	II-42
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan yang ada pada setiap OPD.....	IV-1
Tabel 4.2	Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	IV-2
Tabel 4.3	Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022.....	IV-4
Tabel 4.4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	IV-15
Tabel 4.5	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum.....	IV-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (renja) dimaksudkan sebagai suatu dokumen perencanaan kerja dan anggaran dalam satu tahun yang memuat keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota disertai sejumlah sasaran strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi serta mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021.

Sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dalam hal ini Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan surat edaran Bupati Lima Puluh Kota perihal penyampaian rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah. Surat edaran Bupati tersebut dikeluarkan setelah pembahasan agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelaksanaan forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Rencana Kerja Badan Kesbangpol disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi melalui analisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rancangan Rencana kerja juga direview hasil evaluasi Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah meliputi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta perumusan tujuan dan sasaran.

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam mewujudkan iklim kehidupan bangsa yang demokratis, dinamis, tenteram dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, Rencana Kerja Badan Kesbangpol tahun 2021 disusun dengan mengedepankan aspek prioritas terhadap program dan kegiatan yang

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

menjadi urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun kelima dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 - 2021 disusun untuk memenuhi target program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 juga berbasiskan pada rencana program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah berdasarkan Lampiran IV Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dibuat oleh tim penyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut: (i) persiapan penyusunan; (ii) penyusunan rancangan awal; (iii) penyusunan rancangan; (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (v) perumusan rancangan akhir dan (vi) penetapan. Seluruh tahapan ini dimulai pada bulan Oktober 2019, dan akan selesai pada bulan Juli 2020.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021, hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 (n-2) dan perkiraan capaian Tahun 2020 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling

lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2019. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bapelitbang paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2020.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbang. Namun berdasarkan kesepakatan Bapelitbang dengan OPD untuk mencapai efisiensi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dan efektifitas pelaksanaan Forum, maka Forum Perangkat Daerah dilaksanakan secara gabungan pada Forum Gabungan Perangkat Daerah di Bapelitbang. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan RenjaPerangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja.

Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 disampaikan ke Bapelitbang untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bapelitbang untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkada tentang RKPD oleh Bapelitbang, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. RKPD Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima RPJMD 2016-2021 masa periode pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Ir.Irfendi Arbi, MP-Ferizal Ridwan, S.Sos. RKPD ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021, dimana program-program yang telah ditetapkan akan disinkronkan dengan hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian program

dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diharapkan dapat memenuhi kehendak RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021. Seperti halnya RKPD 2021, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-5 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021. Renja badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini selanjutnya juga akan ditindaklanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 selanjutnya akan menjadi pedoman awal dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 merupakan rancangan awal perumusan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang seterusnya akan dituangkan dalam rancangan Pra RKA Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

- Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 144);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 4).
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 43).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2021 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Landasan Hukum maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu, yang memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu (Tahun $n - 2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n - 1$) serta realisasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, yang memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021.

- IV. Penutup, yang berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan dana, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan rencana kerja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu, dan realisasi rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan/atau realisasi APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan KesbangPol dan Pencapaian Renstra Badan KesbangPol s/d Tahun 2019
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01											
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran											
X	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pembelian Materai selama 1 tahun anggaran	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam satu tahun	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%
X	xx	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Bulan yang dibayar honorinya	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan alat kebersihan yang diadakan dan Jumlah Bulan yang dibayar honorinya	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan ATK yang	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018					
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		diadakan												
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Barang yang di cetak dan Penggandaan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%	
X	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang diadakan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%	
X	xx	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit perelatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	23 unit	13 unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	13 unit	56,52%	
x	xx	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	75 %	12 bulan	60 bulan	83,33%	
X	xx	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultasi	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	75 %	12 bulan	60 bulan	83,33%	
X	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
X	xx	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda	9 unit(1 unit kend roda 4, 8 unit kend	0	2	0	0	0	2	0	0

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		4 yang diadakan	roda 2)										
X	xx	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	25 unit	12 unit	10 unit	9 unit	90%	10 unit	31 unit	124%
X	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah set Pengadaan Mebeleur	80 unit	31 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	39 unit	48,75%
X	xx	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	6 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	5 paket	83,33%
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Service Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	83,33%
X	xx	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%
X	xx	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas								
X	xx	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas yang dibutuhkan	160 stel	38 stel	40 stel	33 stel	82,5%	33 stel	104 stel	65%
		03	05	Pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu	Jumlah Stel Pakaian Khusus yang dibutuhkan	120 stel		0 stel	0 stel	0	0	0	0
X	xx	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Diklat dan Bimtek yang diikuti								
X	xx	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kali yang mengikuti diklat	90 paket	3 paket	5 paket	2 paket	20 %	5 paket	13 paket	14,44%

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018		
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kali Sosialisasi yang diadakan	6 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	3 kali	50%
X	xx 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan								
X	xx 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang ada	120 Dokumen	60 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100 %	20 dokumen	100 dokumen	83,33%
		Urusan Wajib									
19	01 17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek serta Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM								
19	01 17 01	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Jumlah Rekomendasi Rapat yang dilaksanakan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	6 bulan	50 %	12 bulan	42 bulan	58,33%
19	01 17 02	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	15 kali	5 kali	2 kali	1 kali	50 %	2 kali	8 kali	53,33%
19	01 17 03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	72 bulan	20 bulan	20 bulan	3 bulan	15 %	20 bulan	43 bulan	59,72%

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM)											
19	01	17	04	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	39 kali	7 kali	3 kali	2 kali	66 %	3 kali	12 kali	30,76%
19	01	17	05	Kegiatan Diksar Bela Negara	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	-	2 kali	-	-	2 kali	-	-
19	01	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakem dan Kominda								
19	01	18	01	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	72 bulan	34 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	58 bulan	80,55%
19	01	18	02	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	15 kali	4 kali	3 kali	4 kali	133,33 %	3 kali	11 kali	73,33%
19	01	18	03	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan/ Lokasi Sejarah yang dilaksanakan	42 kali peringatan peristiwa sejarah	21 kali peringatan peristiwa sejarah	7 kali peringatan peristiwa sejarah dan 1 kali sosialisasi	7 kali peringatan peristiwa sejarah dan 2 kali sosialisasi	100 %	7 kali peringatan peristiwa sejarah	35 kali peringatan peristiwa sejarah dan 2 kali sosialisai	83,33%
19	01	18	04	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	72 bulan	34 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	58 bulan	80,55%
19	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba								

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018				
					Target Renja SKPD tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
19	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	31 kali	9 kali	5 kali	2 kali	40 %	5 kali	16 kali	51,61%
19	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat								
19	01	21	01	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	26 kali	17 kali	13 kali	6 kali	46,15 %	13 kali	36 kali	138,46%
19	01	21	02	Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Parpol	Jumlah Paket Kegiatan yang dilaksanakan	4 paket	0 paket	1 paket	0	0	1 paket	1 paket	25%
19	01	21	03	Koordinasi Forum-forum diskusi Politik	Jumlah Verifikasi Banpol dan Pembinaan Ormas serta Fasilitas Forkopimda	60 Parpol	30 Parpol 2 angkatan	10 parpol dan 2 angkatan	10 parpol dan 2 angkatan	100%	10 Parpol dan 2 angkatan	50 parpol dan 6 angkatan	83,33%
19	01	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Jumlah Buku yang dibutuhkan	150 set	0 set	150 set	0	0	0	0	0
19	01	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	60 bulan	83,33%

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

Dalam Renja tahun 2019, Badan Kesbangpol Sumbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.730.840.060,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh ribu enam puluh rupiah) yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai 4 program belanja urusan wajib yang terdiri dari 13 kegiatan dan 5 program dan kegiatan setiap SKPD yang terdiri dari 21 kegiatan.

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut, pada KUA PPAS Tahun 2019, Badan Kesbangpol Sumbar memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.148.993.560,- (Dua milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah). Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 program belanja urusan wajib yang terdiri dari 13 kegiatan dan 5 program dan kegiatan setiap SKPD yang terdiri dari 18 kegiatan.

Sedangkan pada KUA PPAS Perubahan Tahun 2019, alokasi anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi Rp. 2.263.193.560,- (Dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), 4 program belanja urusan wajib yang terdiri dari 13 kegiatan dan 5 program dan kegiatan setiap SKPD yang terdiri dari 18 kegiatan. Dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja Badan Kesbangpol Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan rencana kegiatan sebanyak 9 kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 9 kegiatan pada tahun anggaran 2019, diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 9 kegiatan.

Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan
- b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan, selama 12 bulan
- d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
- e) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan
- g) Penyediaan makanan dan minuman selama 12 bulan
- h) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan.

Target kinerja program pelayanan administrasi perkantoran dalam Renja 2019 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2019 sebesar 95,77%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rencana kegiatan sebanyak 6 kegiatan, diakomodir dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Sumbar sebanyak 5 kegiatan yaitu :

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional, sebanyak 2 unit kendaraan roda 2
- b) Pengadaan peralatan gedung kantor, sebanyak 10 set bunga, 2 printer dan 3 alat perekam.
- c) Pengadaan mebeleur, berupa 1 set kursi tamu.
- d) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, 1 paket.
- e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional , 12 bulan.
- f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, 12 bulan.

Terdapat 1 kegiatan dalam Renja 2019 yang tidak diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbangpol Tahun 2019, yaitu :

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional** dengan rencana pengadaan sebanyak 2 unit kendaraan roda 2.

Target kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam Renja 2019 adalah 100%, dengan capaian kinerja program tahun 2019 sebesar 93,59%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rencana kegiatan sebanyak 1 kegiatan, yaitu :

- a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 40 stel Pakaian Dinas Harian (PDH).

Target kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah 100 % dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rencana kegiatan sebanyak 2 kegiatan yaitu,

- a) Pendidikan dan pelatihan formal 5 paket.

- b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan, 1 kali

Target kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah 100% dengan capaian kinerja 54,83%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan rencana kegiatan sebanyak 3 kegiatan, yaitu :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 20 dokumen.

Target kinerja program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah 100% dengan capaian kinerja program sebesar 95,66%.

6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan rencana kegiatan sebanyak 4 kegiatan, diakomodir dalam DPA Tahun 2019 sebanyak 4 kegiatan, yaitu :

- a) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama, berupa 12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah.

- b) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat, berupa 2 kali sosialisasi.

- c) Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa, berupa 20 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah.
- d) Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, sebanyak 3 kali.

Target capaian program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan sebesar 100 %, dengan capaian kinerja program ini sebesar 84,30%.

- 7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan rencana kegiatan 1 kegiatan, yaitu :

- a) Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, sebanyak 5 kali.

Target capaian Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat sebesar 100%, dengan capaian kinerja program 47,01%.

- 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan rencana kegiatan sebanyak 4 kegiatan dan diakomodir dalam DPA 4 kegiatan dan DPPA Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 sebanyak 3 kegiatan, yaitu :

- a) Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat, sebanyak 13 kali
- b) Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, sebanyak 1 paket.
- c) Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik, dengan 10 partai politik dan 2 kali sosialisasi
- d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Politik di 13 Kecamatan.

Target kinerja program pendidikan politik masyarakat dengan capaian kinerja program sebesar 100%, dan tingkat realisasi capaian kinerja program sebesar 91,07 %

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dan program/kegiatan

Bila dilihat dari pemaparan capaian program diatas, maka terdapat 2 program yang target kinerjanya tidak tercapai. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai

dengan jadwal serta tidak memenuhi target kinerja yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya peserta pada Diklat Intelijen yang dilaksanakan oleh BAIS dan Kementerian Dalam Negeri. Dan juga tidak terlaksananya seluruh kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras/narkoba yang disebabkan kekurangan SDM di bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Terdapat 6 program pada Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 yang terpenuhi target kinerjanya. Hal ini diantaranya disebabkan oleh seluruh usulan kegiatan dalam program program tersebut dapat diakomodir seluruhnya dalam DPA dan DPPA Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Kegiatan kegiatan yang tercantum dalam dokumen anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Faktor-Faktor Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan

Dari usulan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2019, tidak terdapat program/kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan KesbangPol Tahun 2016 - 2021

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 2021 disusun dengan mempedomani RPJMD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 yaitu untuk menunjang misi 1 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih. Misi 1 tersebut adalah Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya. Program-program

urusan kesatuan bangsa yang sesuai dengan misi 1 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan,
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat,
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Disamping menunjang misi 1, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menunjang misi 4 Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lima Puluh Kota Terpilih yaitu meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. Program-program yang menunjang dalam mewujudkan misi 4 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila capaian target program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak tercapai maka akan menyebabkan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang misi 1 dan misi 4 Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih tahun 2016 – 2021 akan terganggu.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Agar target perencanaan jangka menengah dalam Renja Tahunan dan DPA dapat tercapai dengan maksimal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan dengan memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang. Penganggaran kegiatan-kegiatan pokok sebagaimana yang

tercantum dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 tetap dilanjutkan, dan ada sejumlah kebijakan strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja Bidang kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya :

- a. Menganggarkan kegiatan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sehingga akan terjadi harmonisasi antara Kepala Daerah dengan instansi vertikal yang ada di daerah, sehingga akan mendukung stabilitas daerah guna kesinambungan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- c. Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- d. Mendukung terciptanya stabilitas daerah dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran KesbangPol dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Perkiraan Capaian Kinerja Program Tahun 2021

Berdasarkan laporan realisasi fisik dan keuangan bulan September 2019, capaian program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, capaian kinerja program 95,77%, tahun 2021 diperkirakan capaian kinerja program sebesar 95%,

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, capaian kinerja program sebesar 93,59%, tahun 2021 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 93%,
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian kinerja program sebesar 100%, tahun 2021 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 100%,
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, capaian kinerja program sebesar 54,83%, tahun 2021 capaian kinerja program diperkirakan 90%,
- e. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 95,66%, tahun 2021 capaian kinerja program diperkirakan 95%,
- f. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, capaian kinerja program sebesar 84,30%, tahun 2021 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 90%,
- g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, capaian kinerja program sebesar 91,86%, tahun 2021 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 90%,
- h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, capaian kinerja program sebesar 47,01%, tahun 2021 capaian kinerja program diperkirakan sebesar 90%,
- i. Program Pendidikan Politik Masyarakat, capaian kinerja program sebesar 91,07%, sampai akhir tahun capaian kinerja program diperkirakan sebesar 90%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan KesbangPol

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Aspek/fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun				Realisasi capaian kinerja setiap tahun			
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
	Pembinaan Politik Daerah	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	13 kali	6 kali		

Sampai dengan bulan September 2019, kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP telah dilaksanakan 1 (satu) kali dengan peserta 35 (tiga puluh lima) orang dari Ormas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Pembinaan Politik Daerah sampai bulan Desember 2019 telah dilaksanakan sebanyak dari target kinerja 3 (tiga) kali terlaksana 6 (enam) kali penyuluhan dengan peserta adalah siswa/siswi SLTA dan Organisasi Kemasyarakatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sampai bulan September 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan KesbangPol Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Sasaran	Indiator)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat	Persentase Pelaksanaan Hari Besar Nasional	80%	100%	100%	100%	125%	100%	2		
2.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik di Kabupaten Lima Puluh Kota	51%	95%	95%	95%	196%	105,26%	-		
		Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras	7%	6%	5%	4%	+30,43%	+4,34%			
3.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota	Persentase partisipasi masyarakat dalam pilg, pilpres dan pemilukada	-	75%	70%	-	-	80%			

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Kalangan Masyarakat telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti Diskusi Pemantapan 4 Pilar, Bimbingan Teknis Pemantapan Nilai-nilai Bela Negara dan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pencapaian target kinerja pada Tahun 2019 adalah persentase pelaksanaan peringatan Hari Bela Negara di 7 (tujuh) titik Peringatan Hari Bela Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- a. Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan) Suhada di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari 2019.

- b. Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuh Batua (Peristiwa Situjuh) tanggal 15 Januari 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- c. Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 2019, yang dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.
- d. Peringatan Peristiwa Perundingan Antara delegasi Natsir/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Jopang , Kecamatan Guguak tanggal 6 Juli 2019.
- e. Peringatan Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kaciak, Kecamatan Guguak tanggal 7 Juli 2019.
- f. Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi (Peringatan Hari Bela Negara) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 2019.
- g. Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 21 Desember 2019 di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Tercapainya IKU Persentase pelaksanaan peringatan hari bela negara disebabkan oleh :

- Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakan di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase fasilitasi penyelesaian konflik Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Demo Pegawai Sukarela di Dinas Kesehatan (Puskesmas se-Kabupaten Lima Puluh Kota), telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Demo Masyarakat Nagari Sungai Talang yang menginginkan pemberhentian Wali Nagari Sungai Talang, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Wali Nagari telah dapat menjalankan tugasnya kembali.
- c. Masalah antara Masyarakat Jorong Banja Ronah, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan PT SRI terkait pembuangan Limbah Pabrik PT SRI dan harga daun gambir yang ditetapkan oleh PT SRI dan pelarangan penjualan daun gambir oleh masyarakat dari luar Banja Ronah, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Polres Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memenuhi target karena adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparat pemerintah Kecamatan, Nagari, dan Wali Jorong.

Pada Tahun 2019 IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras ditargetkan menurun 6% dari Tahun 2018, tapi tidak tercapai, karena terjadi peningkatan kasus penggunaan narkoba dan minuman keras di tahun 2018 yaitu dari 46 kasus dan di Tahun 2019 menjadi 48 kasus, dimana terjadi peningkatan jumlah kasus pengguna narkoba dan minuman keras sebesar 4,34%. Dalam rangka penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Penurunan persentase jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak dapat tercapai karena beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
2. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
3. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
4. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.
5. Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

Pencapaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada, yang ditargetkan 75%, dalam pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tercapai 80%, sedangkan partisipasi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 81,01%. Tingginya partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu Tahun 2019, karena serentakannya pemilu antara Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan KesbangPol

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan

- Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa,
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional,
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - f. Pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan umum tersebut Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh Instansi vertikal. Sehubungan dengan belum disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, sehingga tugas dan fungsi Badan KesbangPol diatur pada ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa seluruh instansi KesbangPol tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan dana dari APBD, sampai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Umm disahkan.

Indikator Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada indikator pelayanan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang mengacu pada RPJMN Tahun 2015 – 2019 yaitu sebagai berikut :

- a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam),
- b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA,
- c. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Adapun indikator pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.

Pada Tahun 2018 telah dilaksanakan peringatan di 7 (tujuh) titik rangkaian peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu

- Peringatan Peristiwa Gugurnya 9 (Sembilan) Suhada di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh Tanggal 10 Januari 2019.
- Peringatan Peristiwa Penyerangan Para Pemimpin PDRI oleh Belanda dan Kaki Tangannya di Wilayah Situjuh Batua (Peristiwa Situjuh) tanggal 15 Januari 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- Peringatan Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 2019, yang dilaksanakan di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau.

- Peringatan Peristiwa Perundingan Antara delegasi Natsir/Pemerintahan RI dengan Pemimpin PDRI di Padang Jopang , Kecamatan Guguak tanggal 6 Juli 2019.
- Peringatan Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kaciak, Kecamatan Guguak tanggal 7 Juli 2019.
- Peringatan Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang Menuju Koto Tinggi (Peringatan Hari Bela Negara) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 19 Desember 2019.
- Peringatan Peristiwa Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tanggal 21 Desember 2019 di Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Dapat disimpulkan dari target pelaksanaan peringatan hari besar nasional 100% pada tahun 2019, terlaksana sebesar 100%.

2. Persentase fasilitasi konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sosial sebagai berikut :
 - Demo Pegawai Sukarela di Dinas Kesehatan (Puskesmas se-Kabupaten Lima Puluh Kota), telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
 - Demo Masyarakat Nagari Sungai Talang yang menginginkan pemberhentian Wali Nagari Sungai Talang, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga Wali Nagari telah dapat menjalankan tugasnya kembali.

- Masalah antara Masyarakat Jorong Banja Ronah, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan PT SRI terkait pembuangan Limbah Pabrik PT SRI dan harga daun gambir yang ditetapkan oleh PT SRI dan pelarangan penjualan daun gambir oleh masyarakat dari luar Banja Ronah, telah difasilitasi penyelesaiannya oleh Polres Lima Puluh Kota, Dinas Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa, dari target persentase fasilitasi penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota yang capaian kinerjanya ditargetkan 95%, tercapai 100%, yang berarti pencapaian target kinerjanya adalah 105,26%.

3. Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman Keras, yang ditargetkan menurun 6% dari Tahun 2018, tetapi tidak tercapai karena terjadinya peningkatan jumlah kasus 46 kasus di tahun 2018 menjadi 48 kasus di tahun 2019, yang berarti pencapaian targetnya menjadi 72,33%.
4. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada, yang ditargetkan 75%, tercapai 80%, yang berarti pencapaian targetnya menjadi 106,6%.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Beberapa permasalahan yang dapat

diidentifikasi pada setiap bidang sesuai dengan tupoksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan pada bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :

1. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
2. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
3. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
4. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
6. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .

b. Permasalahan pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat :

1. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.
2. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
3. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
4. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota.

- c. Permasalahan pada bidang politik dalam negeri :
1. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 3. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
 4. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 5. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional/Internasional (NPSK, SPM dan SDGs)

Pembangunan Nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai penjabaran dari visi, misi, program dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2015 – 2019 dan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025, disusunlah Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.

RPJMN Tahun 2015 – 2019 menekankan pada jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Proklamasi dan Pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan arah tujuan nasional pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,

- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Bila dikaitkan dengan Bab VII RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021, untuk mencapai keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, maka RPJMN Tahun 2015 – 2019 menjadi acuan dalam menyusun RPJMD Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Program Prioritas Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional. Berikut ini adalah sinergitas pembangunan nasional dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dan keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.4

**Sinergitas Pembangunan Nasional dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lima Puluh Kota**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Kab. Lima Puluh Kota	Program Kerja Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota	Target Kinerja Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota yang mendukung prioritas pembangunan Nasional	Capaian Kinerja Badan KesbangPol Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019
1.	Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat - Mental dan karakter	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial di Kab. Lima Puluh Kota	100%
			- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	100%
			- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Pengguna Narkoba dan Minuman keras	

			- Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada	106,6%
--	--	--	---	---	--------

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kendati masih menghadapi permasalahan dan hambatan yang serius, khususnya dalam menangani persoalan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terdapat sejumlah tantangan maupun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota secara maksimal. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya gesekan antar anggota masyarakat maupun antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh sumber daya ekonomi (sengketa lahan, sumber daya alam) dan perbedaan persepsi keagamaan,
- b. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara,
- c. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada,
- d. Tingginya jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras di tengah masyarakat.
- e. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparat pemerintah,
- f. Belum optimalnya kinerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik karena belum lengkapnya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional.

Sedangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem Pemerintahan Daerah, menyempurnakan paket Undang-Undang Politik dan Sistem Pemilu serentak.
- b. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis " Yang Mantap " Berlandaskan Iman dan Taqwa, khususnya misi ke-1 dan misi ke-4 dengan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah seperti TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, BIN, BNN dan Kementerian Agama.
- e. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang Politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

Formulasi Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Untuk Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas politik dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa diperlukan tekad dan energi yang besar dan terencana.

Keterlibatan seluruh stakeholder dalam penjaringan informasi dan koordinasi mutlak dilakukan. Dewasa ini kita lihat banyaknya pihak-pihak atau kelompok yang menginginkan adanya perpecahan dengan memicu berbagai konflik. Dalam kerangka pemikiran ini diperlukan analisis dalam merencanakan dan menjalankan strategi. Beberapa isu penting dalam rangka perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019 bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapat beberapa isu yang memerlukan perhatian dan fokus pemerintahan daerah :
 - a. Makin hari rasa berbangsa dan bernegara makin “memudar”.
 - b. Makin menurunnya moral dari generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya.
 - c. Sikap dan tindak tanduk masyarakat sudah jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
 - d. Dengan adanya otonomi daerah apalagi otonomi pendidikan melemahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Kurangnya dukungan dan kebijakan pemerintah untuk peningkatan moral bangsa.
 - f. Belum terbentuknya lembaga teknis Pusat Pendidikan Kebangsaan .
2. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada kewaspadaan dan pembinaan masyarakat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Karakteristik daerah yang dibangun dalam kondisi yang masih terbatas yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, politik dan kewilayahan serta rawan akan konflik.

- b. Masih kurangnya kesamaan persepsi dalam kegiatan keagamaan.
 - c. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga sektoral di bidang kewaspadaan dini.
 - d. Masih kurangnya pelaksanaan penyuluhan tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika psikoaktif dan zat adiktif lainnya kepada Tokoh Masyarakat maupun generasi muda di kabupaten Lima Puluh Kota
3. Beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah pada bidang politik dalam negeri pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- a. Masih terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda
 - b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat mendaftarkan ormas dan LSM.
 - c. Belum terhimpunnya seluruh data ormas, parpol dan LSM di Kabupaten Lima Puluh Kota
 - d. Kurangnya kesadaran pengurus parpol penerima bantuan keuangan dalam penyelesaian administrasi bantuan keuangan parpol.
 - e. Belum maksimal pelaksanaan monev terhadap keberadaan ormas, parpol dan LSM di Kab. Lima Puluh Kota.

Fokus penyelenggaraan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten untuk tahun mendatang, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendukung terciptanya stabilitas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan meningkatkan peran dan fungsi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.
- b. Meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan deteksi dini aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui :

- Pemetaan daerah rawan konflik sosial,
 - Mewaspadaai isu terorisme/radikalisme,
 - Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat,
 - Pengawasan terhadap orang asing.
- c. Membentuk dan memberdayakan Forum-forum yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti :
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA),
 - Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDPD),
 - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB),
 - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
 - Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM),
 - Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
 - Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
 - Tim Verifikasi/penelitian permohonan pencairan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota,
 - Tim pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Badan KesbangPol dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan

yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lembar.....dari.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD					
1.1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah bulan pembelian Materai selama 1 tahun anggaran	12 bulan	3.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Badan KesbangPol	Jumlah bulan pembelian Materai selama 1 tahun anggaran	12 bulan	3.840	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam satu tahun	12 bulan	45.420	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam satu tahun	12 bulan	43.092	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan yang dibayar honoronya	12 bulan	290.400	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan yang dibayar honoronya	12 bulan	256.604	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan alat kebersihan yang diadakan dan Jumlah Bulan yang dibayar honoronya	12 bulan	30.300	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan alat kebersihan yang diadakan dan Jumlah Bulan yang dibayar honoronya	12 bulan	30.300	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan ATK yang diadakan	12 bulan	38.720	Penyediaan alat tulis kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan ATK yang diadakan	12 bulan	30.865	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan Barang yang di cetak dan Penggandaan	12 bulan	29.040	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan Barang yang di cetak dan Penggandaan	12 bulan	34.125	
7.	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan komponen	12 bulan	9.680	Penyediaan komponen instalasi	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan komponen	12 bulan	9.680	

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2021

		ol	instalasi/ penerangan bangunan kantor yang diadakan			listrik/penerangan bangunan kantor	ol	instalasi/ penerangan bangunan kantor yang diadakan			
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah unit perelatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 laptop dan 1 printer	17.600	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Badan KesbangPol	Jumlah unit perelatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 laptop dan 4 kipas angin	30.000	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Badan KesbangPol	Jumlah Porsi makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	12 bulan	29.040	Penyediaan makanan dan minuman	Badan KesbangPol	Jumlah Porsi makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	12 bulan	26.125	
10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan KesbangPol	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	193.546	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Badan KesbangPol	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	193.546	
1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan KesbangPol	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Badan KesbangPol	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan		
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	1 unit kendaraan roda empat, 2 unit kendaraan roda 2	404.875	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	2 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4	54.875	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 kipas angin, karpet,10 bunga,4 printer, 1 kamera, 1 alat perekam	44.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 unit laptop, 1 set alas meja rapat, 1 set gordem, 1 unit printer	57.000	
3	Pengadaan mebeleur	Badan KesbangPol	Jumlah set Pengadaan Mebeleur	1 set kursi tamu, 2 meja kerja dan 5 kursi kerja	29.040	Pengadaan mebeleur	Badan KesbangPol	Jumlah set Pengadaan Mebeleur	3 set Lemari Arsip, 32 buah kursi rapat	29.040	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemasangan pavingblock, pembuatan kamar mandi, perbaikan plavon, pembuatan parker roda 2	16.500	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Badan KesbangPol	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	16.500	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan Service Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	12 bulan	100.463	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Badan KesbangPol	Jumlah Bulan Service Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	12 bulan	101.463	
6	Pemeliharaan rutin/berkala	Badan	Jumlah Bulan	12 bulan	28.162	Pemeliharaan	Badan	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12 bulan	16.850	

	peralatan gedung kantor	KesbangPol	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor			rutin/berkala peralatan gedung kantor	KesbangPol	Peralatan Gedung Kantor			
1.3	Program peningkatan disiplin aparatur		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas			Program peningkatan disiplin aparatur		Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas			
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan KesbangPol	Jumlah Stel Pakaian Dinas yang dibutuhkan	40 stel	20.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Badan KesbangPol	Jumlah Stel Pakaian Dinas yang dibutuhkan	40 stel	20.000	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan KesbangPol	Jumlah Stel Pakaian Khusus yang dibutuhkan	40 stel pakaian daerah		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Badan KesbangPol	Jumlah Stel Pakaian Khusus yang dibutuhkan	40 stel	0	
1.4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Badan KesbangPol	Jumlah Diklat dan Bimtek yang diikuti			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Jumlah Diklat dan Bimtek yang diikuti			
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan KesbangPol	Jumlah kali yang mengikuti diklat	10 paket	35.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Badan KesbangPol	Jumlah kali yang mengikuti diklat	5 paket	35.000	
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah kali Sosialisasi yang diadakan	1 kali	20.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Badan KesbangPol	Jumlah kali Sosialisasi yang diadakan	1 kali	20.000	
1.2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah Dokumen Laporan yang ada	20 dokumen	45.917	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Badan KesbangPol	Jumlah Dokumen Laporan yang ada	20 dokumen	41.667	
2.	Urusan Wajib										
2.1	Program Pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek serta Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM			Program Pengembangan wawasan kebangsaan		Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek serta Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM			
1.	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Badan KesbangPol	Jumlah Rekomendasi Rapat yang dilaksanakan	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 240 orang	295.464	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Badan KesbangPol	Jumlah Rekomendasi Rapat yang dilaksanakan	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	126.505	

2.	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Badan Kesbangpol	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	400 orang	290.000	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Badan Kesbangpol	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	10 kali sosialisasi	56.177	
3.	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum)	Badan Kesbangpol	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	20 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 150 orang	260.090	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Badan Kesbangpol	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah	88.049	
4.	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	4 angkatan (200 orang)	286.000	Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	10 kali sosialisasi	91.518	
5.	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Badan Kesbangpol	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	1 angkatan (950 orang)	500.000	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali sosialisasi	0	Perlu anggaran yang besar karena peserta mulai dari pakaian, penginapan dan uang saku
2.2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakem dan Kominda			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakem dan Kominda			
1.	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 30 orang	663.800	Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	12 laporan/rekomendasi kepada kepala daerah dan 30 orang	402.176	
2.	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	12 angkatan (600 orang)	290.000	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	8 kali sosialisasi	90.840	
3.	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kegiatan/ Lokasi Sejarah yang dilaksanakan	7 lokasi titik sejarah PDRI	469.365	Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kegiatan/ Lokasi Sejarah yang dilaksanakan	7 lokasi titik sejarah PDRI	348.968	

						Wawasan Kebangsaan					
4	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	12 laporan/rekom endasi kepada kepala daerah	686.090	Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan	12 laporan/rekom endasi kepada kepala daerah	245.804	
2.3	Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba					Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba			
1	<i>Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba</i>	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	6 angkatan (180 orang)	665.992	<i>Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan minuman keras dan narkoba</i>	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	6 kali sosialisasi	206.697	
2.4	Program Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat			Program Pendidikan Politik Masyarakat		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat			
1	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	13 kecamatan (540 orang) dan 2 angkatan (160 orang)	211.118	Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	3 kali sosialisasi	63.150	
2	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Kegiatan yang dilaksanakan	Fasilitasi PAW DPRD Kab. Lima Puluh Kota	15.120	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Kegiatan yang dilaksanakan	1 paket kegiatan	3.000	
3	Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Verifikasi Banpol dan Pembinaan Ormas serta Fasilitasi Forkopimda	10 Partai Politik dan 3 angkatan (175 orang)	1.488.438,5	Koordinasi Forum- forum Komunikasi Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Verifikasi Banpol dan Pembinaan Ormas serta Fasilitasi Forkopimda	10 verifikasi	881.681	
4	Penyusunan Data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Buku yang dibutuhkan	150 buah buku		Penyusunan data Base Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Buku yang dibutuhkan	150 buah buku	0	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring	13 Kecamatan	61.148	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring	13 kecamatan	26.107	

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Program yang tertuang pada rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang tertuang pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 9 Program.
2. Jumlah kegiatan yang tertuang pada rancangan awal RKPD adalah 34 kegiatan, sedangkan kegiatan yang tertuang pada analisis kebutuhan adalah 33 kegiatan, 1 (satu) kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan tidak dianggarkan yaitu kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara, yang disebabkan karena membutuhkan anggaran yang sangat besar karena peserta dibiayai mulai dari pakaian, penginapan, dan uang saku.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja Organisasi Perangkat Daerah salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Namun sampai dengan proses penyusunan Renja Tahun 2020 dilakukan, belum diterima usulan program/kegiatan masyarakat/pemangku kepentingan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.6
 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 , sasaran utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Pembangunan sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhanaan Birokrasi.
5. Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-

masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Badan KesbangPol harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Prioritas 1 dan 3 yaitu :

- Pembangunan SDM.
- Penyederhanaan Birokrasi.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Badan KesbangPol perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Badan KesbangPol mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 Visi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka menengah tersebut adalah **"Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis " yang mantap"berlandaskan iman dan taqwa"**.

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi ekonomi dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

5. Memperkuat kelembagaan Nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Terkait dengan pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut diatas maka ditetapkan Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Revolusi mental.
2. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri.
3. Pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Investasi dan kemudahan berusaha.
5. Penguatan ekonomi kerakyatan .
6. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
7. Reformasi birokrasi.
8. Penguatan Nagari.
9. Penataan ruangan dan kawasan strategis.
10. Fasilitas umum dan fasilitas social berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
11. Pengembangan daerah basis perjuangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan KesbangPol

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Badan KesbangPol Tahun 2016-2021

Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rensta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Masyarakat
3. Terwujudnya stabilitas keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Terwujudnya Situasi dan Kondisi Politik yang Demokratis

B. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
2. Meningkatnya kesadaran, Pemahaman, Pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
4. Meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan KesbangPol Tahun 2021

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuannya : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wawasan Kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)
- b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

- c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa (Sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
- d. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuan : Meningkatnya Kemitraan Pengembang Wawasan Kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)
- b. Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- c. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- d. Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Tujuan : Penurunan Penyakit Masyarakat

Kegiatan- kegiatan yang dilakukakn antara lain :

- a. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tujuannya : Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Kegiatan Penyuluhan Politik Kepada Masyarakat
- b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol
- c. Koordinasi Forum-forum Komunikasi Politik
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik

5. Program pelayanan administrasi perkantoran

Tujuannya : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

6. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tujuannya : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mobeuleur
- d. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Program peningkatan disiplin aparatur

Tujuannya : Meningkatnya disiplin aparatur

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tujuannya : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur,

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Pendidikan dan pelatihan formal
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tujuannya : Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas adalah :

1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Badan KesbangPol.
3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan KesbangPol.
5. Meningkatnya pengetahuan ormas dan parpol serta tokoh masyarakat tentang pengetahuan politik.
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila.
7. Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan muspida dan instansi vertikal lainnya mengenai stabilitas daerah dan aliran kepercayaan.
8. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penurunan pekat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan napza.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Tujuannya : Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Arti Pentingnya Wawasan Kebangsaan dan penguatan karakter kebangsaan

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

2. Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tujuan : Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang Politik

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tujuan : Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan

Kegiatan- kegiatan yang dilakukakn antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Tujuannya : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban di Tengah Masyarakat

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tujuannya : Meningkatnya kewaspadaan dini, cegah dini dalam rangka penanganan konflik di tengah masyarakat.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuannya : Terpenuhinya kebutuhan ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Administrasi keuangan,
- b. Administrasi Umum,
- c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas adalah :

1. Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur Badan KesbangPol.
3. Terlaksananya koordinasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Badan KesbangPol.

5. Meningkatnya pengetahuan ormas dan parpol serta tokoh masyarakat tentang pengetahuan politik.
6. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta Ideologi Pancasila.
7. Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan muspida dan instansi vertikal lainnya mengenai stabilitas daerah dan aliran kepercayaan.
8. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penurunan pekat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan peredaran dan penyalahgunaan napza.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada Program dan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu juga berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti :

- a. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Hidup Beragama, berpedoman kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat, berpedoman kepada Permendagri

Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum
Pembauran Kebangsaan.

- c. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa berpedoman kepada Permendagri No. 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah.
- d. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
- e. Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, mempedomani Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep 004/01/1994.
- f. Kegiatan Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
- g. Kegiatan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan berpedoman kepada Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- h. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi KOMINDA, berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ Tanggal 23 Februari 2015 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- i. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- j. Kegiatan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat, berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Kepada Generasi Muda.
- k. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik, berpedoman kepada Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- l. Kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- m. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik.

Sedangkan Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada Program dan Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Disamping itu juga berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya, berpedoman kepada:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
 2. Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep 004/01/1994.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- b. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan berpedoman kepada:
1. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
 3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial berpedoman kepada:
1. Permendagri No. 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- d. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah berpedoman kepada:
1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Kepada Generasi Muda.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik.

Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 4 (empat) Program Urusan Wajib dengan yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 5 Program yang merupakan Program dan Kegiatan Setiap OPD yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kegiatan. Total 9 (sembilan) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan :

4 (empat) Program Urusan Wajib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, mencakup kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya luhur bangsa, Sosialisasi wawasan kebangsaan dan Diksar Bela Negara.
- b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan , mencakup kegiatan fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan, seminar,talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Pentas seni dan Budaya,festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan Koordinasi dan fasilitasi KOMINDA.
- c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, mencakup kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
- d. Program Pendidikan Politik Masyarakat, mencakup kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik, koordinasi forum-forum diskusi

politik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik.

Sedangkan 5 (lima) program yang merupakan Program dan Kegiatan Setiap OPD adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, mencakup kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , mencakup kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Mebeuler, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Program peningkatan kapasitas aparatur, mencakup kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
4. Program peningkatan disiplin aparatur, mencakup kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta Kelengkapannya.
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, mencakup kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Untuk Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 5 (Lima) Program Unsur Pemerintahan Umum dengan yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan. Total 6 (enam) Program dan 8 (delapan) kegiatan :

5 (lima) Program Urusan Pemerintahan Umum tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik , dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Sedangkan 1 (lima) program yang merupakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup Kegiatan sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan.

2. Administrasi Umum.

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Badan KesbangPol untuk Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Badan KesbangPol tahun 2016-2021. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No. 13 tahun 2006.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Badan KesbangPol dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.1
Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Kegiatan jasa administrasi keuangan4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan8. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Kegiatan Pengadaan Mebeuler 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor 6. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.	Peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 4.2

**Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri**

No	PROGRAM	KEGIATAN
I	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB) 2. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan masyarakat 3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 4. Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.

II	Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 2. Seminar, Talk show, diskusi peningkatan wasbang 3. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wasbang 4. Koordinasi dan Fasilitasi Kominda
III	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba
IV	Program Pendidikan Politik Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyuluhan politik kepada masyarakat 2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan parpol 3. Koordinasi Forum-forum diskusi politik 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perkembangan politik

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 9 program dengan 33 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SKPD

: **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD												
0	00	00	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			658,177,000.85			686,746,000.00	
0	00	00	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pembelian Materai selama 1 tahun anggaran	Kesbang Pol	12 bulan	3,840,000.00	DAU		12 bulan	3,000,000.00
0	00	00	01	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam satu tahun	Kesbang Pol	12 bulan	43,092,000.00	DAU		12 bulan	45,420,000.00

0	00	00	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Bulan yang dibayar honorinya	Kesbang Pol	12 bulan	256,604,000.00	DAU		12 bulan	290,400,000.00
0	00	00	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan alat kebersihan yang diadakan dan Jumlah Bulan yang dibayar honorinya	Kesbang Pol	12 bulan	30,300,000.00	DAU		12 bulan	30,300,000.00
0	00	00	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan ATK yang diadakan	Kesbang Pol	12 bulan	30,865,000.85	DAU		12 bulan	38,720,000.00
0	00	00	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Barang yang di cetak dan Penggandaan	Kesbang Pol	12 bulan	34,125,000.00	DAU		12 bulan	29,040,000.00
0	00	00	01	12	Penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor yang diadakan	Kesbang Pol	12 bulan	9,680,000.00	DAU		12 bulan	9,680,000.00
0	00	00	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit perelatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kesbang Pol	2 komputer PC	30,000,000.00	DAU		unit	17,600,000.00
0	00	00	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Porsi makanan dan minuman Rapat dan Tamu yang disediakan	Kesbang Pol	1056 porsi	26,125,000.00	DAU		12 bulan	29,040,000.00
0	00	00	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultasi	Kesbang Pol	314 oh	193,546,000.00	DAU		12 bulan	193,546,000.00
0	00	00	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesbang Pol	100%	275,728,000.00				623,040,000.00

0	00	00	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4 yang diadakan	Kesbang Pol	2 Paket	54,875,000.00	DAU		2 paket	404,875,000.00
0	00	00	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kesbang Pol	6 unit	57,000,000.00	DAU		1 paket	44,000,000.00
0	00	00	02	10	Pengadaan Mobeuleur	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur	Kesbang Pol	1 Paket	29,040,000.00	DAU		1 paket	29,040,000.00
0	00	00	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung Kantor	Kesbang Pol	3 paket	16,500,000.00	DAU		Peng ecata n Gedung Kant or	16,500,000.00
0	00	00	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaandinas/operasion al	Jumlah Bulan Service Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang diadakan	Kesbang Pol	12 bulan	101,463,000.00	DAU		12 bulan	100,463,000.00
0	00	00	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemelirahaan Peralatan Gedung Kantor	Kesbang Pol	12 bulan	16,850,000.00	DAU		12 bulan	28,162,000.00
0	00	00	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	Kesbang Pol	40 stel	20,000,000.00			40 stel	20,000,000.00
0	00	00	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas yang dibutuhkan	Kesbang Pol	40 stel	20,000,000.00	DAU			0.00

0	00	00	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Stel Pakaian Khusus yang dibutuhkan	Kesbang Pol	40 stel	0.00	DAU		40 stel	0.00
0	00	00	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Diklat dan Bimtek yang diikuti	Kesbang Pol	6 kali	55,000,000.00			6 kali	55,000,000.00
0	00	00	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kali yang mengikuti diklat	Kesbang Pol	5 kali diklat	35,000,000.00	DAU		5 kali diklat	35,000,000.00
0	00	00	05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kali Sosialisasi yang diadakan	Kesbang Pol	1 kali sosialisasi	20,000,000.00	DAU		1 kali sosialisasi	20,000,000.00
0	00	00	06		Program Peningkatan pengembangan sisten pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kesbang Pol	87%	41,667,000.00			87%	45,917,000.00
0	00	00	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang ada	Kesbang Pol	20 dokumen	41,667,000.00	DAU		12 bulan	45,917,000.00
					URUSAN WAJIB								
					Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				362,249,500.00			-	1,187,099,000.00
6	00	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan bimtek serta Persentase Pelaksanaan Rapat-rapat Tim FKUB, PKS dan FKDM	Kab. Lima Puluh Kota	100%	1.687.109.000	DAU		100%	1.687.109.000

6	00	01	17	01	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama (FKUB)	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	126,505,000.00	DAU	Pemantauan terhadap kehidupan keagamaan dan kewaspadaan terhadap aliran sesat, dasar hukumnya Perbup No. 10 Th 2012 Ttg Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian rumah ibadah di Lima Puluh Kota	12 x Rapat	325,000,000.00
---	----	----	----	----	---	--------------------------------	----------------------	----------------	----------------	-----	--	------------	----------------

6	00	01	17	02	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	10 x Bimtek	56,177,000.00	DAU	Dasar hukumnya Keppres No. 28 Th.2006 tentang Hari Bela Negara dan rangkain peristiwa ya di Kab. Lima Puluh Kota dan Permendagri No. 34 Th. 2006 Ttg Pedoman pembentukan forum pembauran kebangsaan	10 x sosialisasi	290,000,000.00
---	----	----	----	----	---	---------------------------------	---------------------------	-------------	---------------	-----	---	------------------	----------------

6	00	01	17	03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	88,049,500.00	DAU	Dasar hukumnya Permendagri No. 12 Th 2006 Ttg Kewaspadaan dini masyarakat di daerah	12 x rapat	286,099,000.00
6	00	01	17	04	Kegiatan Sosialisasi wawasan kebangsaan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	10 x sosialisasi	91,518,000.00	DAU	Dasar hukumnya Keppres No. 28 Th 2006 Ttg Hari Bela Negara, Perbup No. 34 Th 2010 Ttg Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kab. Lima Puluh Kota serta pelaksanaan diksar bela Negara	10 x sosialisasi	286,000,000.00

6	00	01	17	05	Kegiatan Pendidikan Dasar Bela Negara	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	2 x sosialisasi	0.00	DAU		2 x sosialisasi	0.00
6	00	01	18		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Bela Negara dan Persentase Pelaksanaan Rapat-Rapat Tim Pakem dan Kominda	Kab. Lima Puluh Kota	100%	1,087,789,110.00	DAU		100%	2,080,847,000.00
6	00	01	18	01	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PAKEM)	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	402,176,000.00	DAU	Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep 004/01/1994	12 x rapat	730,180,000.00
6	00	01	18	02	Kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	8 x sosialisasi	90,840,500.00	DAU	Perlu dilakukan sosialisasi dan Bimtek PDRI karena semakin menipisnya rasa cinta terhadap tanah air, dasar hukumnya Keppres No. 28 Th 2006 dan Perbup No. 34 Th. 2010	8 x Sosialisasi	290,000,000.00

6	00	01	18	03	Pentas Seni dan Budaya, Festifal, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan/ Lokasi Sejarah yang dilaksanakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	7 Kegiatan/lokasi titik sejarah PDRI	348,968,000.00	DAU	Perbup No. 34 Th. 2010 Tentang Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwa Sejarah di Kab. Lima Puluh Kota	7 lokasi titik sejarah PDRI	469,365,000.00
6	00	01	18	04	Koordinasi dan Fasilitas KOMINDA	Jumlah Rapat yang dilaksanakan	Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Rekomendasi	245,804,610.00	APBD	Dasar hukumnya Permendagri No. 16 Tahun 2011 Ttg Perubahan Permendagri No. 11 Th. 2006 Ttg Komunitas Intelijen Daerah dan Perbup No. 12 Th. 2012 Ttg Komunitas Intelijen Daerah	12 x rapat	591,302,000.00

6	00	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Kab. Lima Puluh Kota	100%	206,697,250.00	DAU		100%	467,394,500.00
6	00	01	20	01	Penyuluhan Pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	6 x sosialisasi	206,697,250.00	DAU	Permendagri No. 21 Th. 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Reses DPRD	6 x sosialisasi	467,394,500.00
6	00	01	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Politik kepada Masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota	100%	973,938,999.00	DAU		100%	1,775,824,500.00

6	00	01	21	01	Penyuluhan Politik	Jumlah sosialisasi	Kab. Lima	3 x	63,150,000.00	DAU	Penyuluh	3 x	211,118,000.00
---	----	----	----	----	--------------------	--------------------	-----------	-----	---------------	-----	----------	-----	----------------

Rencana Kerja Badan KesbangPol Lima Puluh Kota Tahun 2020

					Kepada Masyarakat	yang dilaksanakan	Puluh Kota	sosialisasi			an Politik dan Sosialisasi Bantuan Politik	sosialisasi	
6	00	01	21	02	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Parpol	Jumlah Paket Kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Lima Puluh Kota	1 paket kegiatan	3,000,000.00	DAU	Fasilitasi PAW	1 paket kegiatan	15,120,000.00
6	00	01	21	03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah Verifikasi Banpol dan Pembinaan Ormas serta Fasilitasi Forkopimda	Kab. Lima Puluh Kota	10 verifikasi	881,681,499.00	DAU	Verifikasi Keuangan Partai Politik, Tim Fasilitasi Orkemas serta sosialisasi Undang-Undang Orkemas	10 Verifikasi	1,488,438,500.00
6	00	01	21	04	Penyusunan Data Base Partai Politik	Jumlah Buku yang dibutuhkan	Kab. Lima Puluh Kota	150 buah buku	-	DAU			-

6	00	01	21	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Partai Politik	Jumlah Kecamatan Pelaksanaan Monitoring	Kab. Lima Puluh Kota	13 Kecamatan	26,107,500.00	DAU	Monev untuk Pemilu Kepala Daerah dan perkembangan Politik	13 Kecamatan	61,148,000.00
					JUMLAH				3,681,246,859.85				6,921,868,000.00

Sedangkan nomenklatur program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Badan KesbangPol dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program Unsur Pemerintahan Umum. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4.4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan 2. Administrasi Umum 3. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tabel 4.5
Program dan Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN
I	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
II	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

III	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
IV	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
V	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan dua pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 6 (enam) program dengan 8 (delapan) kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.6 berikut:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.0 3 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	pembelian jumlah bulan pembelian materai selama 1 tahun anggaran	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	3,840,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4,416,000
8 01 01 2.0 3 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	pembeljumlah bulan pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet dalam 1 tahun	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	43,092,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	49,555,800
8 01 01 2.0 3 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan yang dibayar honorinya	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	256,604,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	295,094,600
8 01 01 2.0 3 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan alat kebersihan yang diadakan Jumlah bulan yang dibayar honorinya	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan,	100 %	12 bulan 12 bulan	100 persen	30,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	34,845,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Semua Keluraha n									
8 01 01 2.0 3 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan ATK yang diadakan	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 bulan	100 persen	30,865,001	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	35,494,751
8 01 01 2.0 3 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang yang dicetak dan penggandaan	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 bulan	100 persen	34,125,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	39,243,750
8 01 01 2.0 3 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan komponen instalasi/peneran gan bangunan kantor yang diadakan	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 bulan	100 persen	9,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	11,132,000
8 01 01 2.0 3 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Persentase terlaksananya penunjang urusan	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan	Persentase pelaksanaan Administasi	Kab. Lima Puluh Kota,	100 %	2 unit	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum -		Persentase terlaksananya penunjang urusan	100 %	34,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
	Kantor	Pemerintahan Daerah	kantor yang diadakan	Umum	Semua Kecamata n, Semua Keluraha n					Dana Alokasi Umum		Pemerintahan Daerah		
8 01 01 2.0 3 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah porsi makanan dan minuman dan minuman rapat dan tamu yang disediakanrapat	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1900 porsi	100 persen	26,125,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	30,043,750
8 01 01 2.0 3 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah oh yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	304 oh	100 persen	193,546,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	222,577,900
8 01 01 2.0 3 20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda dua yang diadakan	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	2 paket	100 persen	54,875,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	63,106,250

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.0 3 24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	6 unit	100 persen	57,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	65,550,000
8 01 01 2.0 3 25	Pengadaan Mebeleur	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan mebeleur	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 paket	100 persen	29,040,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	33,396,000
8 01 01 2.0 3 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	3 paket	100 persen	16,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	18,975,000
8 01 01 2.0 3 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pengadaan suku cadang, service dan pajak kendaraan roda 4 dan roda 2 yang	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an,	100 %	12 bulan	100 persen	101,463,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	116,682,450

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			diadakan		Semua Keluraha n									
8 01 01 2.0 34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan gedung kantor	Persentase pelaksanaan Administasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 bulan	100 persen	16,850,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	19,377,500
8 01 01 2.0 4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								75,000,000					86,250,000
8 01 01 2.0 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah stel pakaian dinas yang dibutuhkan	Persentase pelaksanaan peningkatan Disiplin dan kapasitas SDA	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 stel	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23,000,000
8 01 01 2.0 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kali mengikuti diklat	Persentase pelaksanaan peningkatan Disiplin dan kapasitas SDA	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 kali	100 persen	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	40,250,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.0 4 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kali sosialisasi yang diadakan	Persentase pelaksanaan peningkatan Disiplin dan kapasitas SDA	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	1 kali	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	23,000,000
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							587,503,500					675,629,025	
8 01 02 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							587,503,500					675,629,025	
8 01 02 2.0 1 03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pencapaian penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan Jumlah kegiatan/lokasi sejarah yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Meningkatnya pemahaman dan Kesadaran Bela Negara Bagi Anak Bangsa	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	10 bimtek 7 titik 18 sosialisa si	80 persen	587,503,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pencapaian penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100 %	675,629,025
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							970,938,999					1,116,579,849	
8 01 03 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							970,938,999					1,116,579,849	
8 01 03 2.0 1 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	Jumlah paket kegiatan yang dilaksanakan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat	Kab. Lima Puluh Kota,	100 %	1 paket 3 sosialisa	80 persen	66,150,000	Dana Transfer Umum -		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	100 %	76,072,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
	Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	tentang politik	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		si			Dana Alokasi Umum		dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
8 01 03 2.0 1 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah rapat koordinasi pimpinan daerah Jumlah verifikasi bantuan parpol	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 kali 10 partai	80 persen	878,681,499	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	1,010,483,724

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
8 01 03 2.0 05 1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	jumlah bulan dilakukan monitoring jumlah kecamatan dilakukan monitoring	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang politik	Semua Kabupate n/Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	12 bulan 13 kecamatan	80 persen	26,107,500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	30,023,625
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								403,000,000					463,450,000
8 01 04 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								403,000,000					463,450,000
8 01 04 2.0 03 1	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan ormas dan pemberian hibah ormas	Terciptanya tertib administrasi banpol dan ormas	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat	100 %	10 ormas	90 persen	403,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi		Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	463,450,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				an, Semua Keluraha n					Umum				
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								735,378,250				845,684,987	
8 01 05 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya								735,378,250				845,684,987	
8 01 05 2.0 03 1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pencapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah rekomendasi/notulen yang dihasilkan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Persentase fasilitas penyelesaian konflik sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 rekomendasi 6 kali	95 persen	735,378,250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase pencapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 %	845,684,987
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								333,854,110				383,932,226	
8 01 06 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								333,854,110				383,932,226	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.64.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n				Tolok Ukur	Target	
8 01 06 2.0 1 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi/not ulen yang dihasilkan	Persentase penyelesaian Konflik sosial	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	24 rekom endasi	95 persen	333,854,110	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	383,932,226
TOTAL									6,782,489,388					7,799,862,795

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Program Tahunan** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan bangsa dan Politik sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Kesbang Pol. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan

serta disiplin semua unsur Badan Kesbang Pol, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kesbang Pol juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Kesbang Pol dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesbang Pol Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Kesbang Pol dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada Tanggal 5 Agustus 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR, AP. M. Si
NIP. 19730913 1999311 1 001



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 285 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 148);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
 - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2021;
 - b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan arahan Pengarah melalui Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT :** Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA :** Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA

masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 285 TAHUN 2019

TANGGAL : 08 November 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota
	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota
	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	INSPEKTORAT	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
4.	DINAS KESEHATAN	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	DINAS SOSIAL	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota
	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota
	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	DINAS PERHUBUNGAN	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota
	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota
20.	DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana, Prasarana, Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
21.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
22.	DINAS PERIKANAN	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	DINAS PANGAN	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
27.	BADAN KEUANGAN	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota
	Kasubid Bintang, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubid Bina Potensi Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Pengarahan dan Pengendalian Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Hal Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
43.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota
	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
30.	KECAMATAN GUGUAK	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
31.	KECAMATAN PAYAKUMBUH	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
32.	KECAMATAN MUNGKA	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
33.	KECAMATAN SULIKI	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
34.	KECAMATAN BUKIK BARISAN	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
35.	KECAMATAN GUNUANG OMEH	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
36.	KECAMATAN LUAK	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
37.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
38.	KECAMATAN HARAU	
	Camat Harau	Ketua

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
39.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
40.	KECAMATAN AKABILURU	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
41.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
42.	KECAMATAN KAPUR IX	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 08 November 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI